

Ekologi Politik Pariwisata Perburuan Hewan di Afrika Selatan

Fameilia Handayani^{1*}, Ica Wulansari²

^{1,2}Universitas Paramadina, Jakarta

*e-mail korespondensi: fameilia.handayani@students.paramadina.ac.id

Kronologi Naskah: diterima 25 Februari 2023; direvisi 13 Juni 2023; diputuskan 14 Juni 2023

Abstract

Hunting tourism in South Africa increase the economic sector in agriculture (34,4%) but brings the impact of the ecological crisis. Collecting data was conducted by the literature study and the analysis used political ecology and environmental economics theory which explaining the phenomenon of change and reformulating policies on environmental management that occur in animal hunting. Tourism activities increase the demand for goods and services, which makes these activities bring direct and indirect effects on state income. The increasing activity of hunting animals has an impact on the environment that accompanies such activities and threats to animal diversity as environmental exploitation. Animal tourism seeks a relation between the environment and power. Animal, biodiversity, aren't stagnant environments resources, their sustainability varies based on interrelationships and state policies. Excessive hunting of animals will cause the endangered species where this will affect the surroundings and result in prolonged effect on forest biota.

Keywords: *Hunting Tourism, Politic Ecology, South Africa*

Abstrak

Pariwisata perburuan hewan di Afrika Selatan menyumbang sektor ekonomi pada pertanian 34,3% namun membawa dampak krisis ekologi. Menggunakan studi literatur serta teori ekologi politik dan ekonomi lingkungan dengan tujuan bukan hanya menjelaskan fenomena perubahan lingkungan namun mereformulasikan kebijakan atas pengelolaan lingkungan yang terjadi dalam perburuan hewan. Melalui kegiatan pariwisata perburuan meningkatkan permintaan barang dan jasa yang menjadikan kegiatan ini membawa efek langsung dan tidak langsung dalam pemasukan Negara. Meningkatnya aktifitas pariwisata perburuan hewan berdampak terhadap lingkungan yang menyertai kenaikan aktifitas dan ancaman bagi keanekaragaman satwa hingga eksploitasi lingkungan. Pariwisata perburuan hewan memperlihatkan hubungan antara lingkungan dan kekuasaan. Satwa liar, keanekaragaman hayati dan lingkungan bukanlah sumber daya yang stagnan, keberlangsungannya berubah-ubah berdasarkan hubungan antar manusia serta kebijakan Negara. Perburuan hewan yang berlebihan akan menyebabkan menurunnya spesies hewan dimana hal ini akan memengaruhi sekitarnya dan mengakibatkan efek berkepanjangan terhadap biota hutan.

Kata kunci: Afrika Selatan, Ekologi Politik, Pariwisata perburuan,

Pendahuluan

Pariwisata perburuan hewan ialah perburuan hewan yang tidak dijinakkan yang dilakukan di lingkungan alam hewan (taman nasional) maupun penangkaran (Bauer & Herr, 2004). Dengan adanya fenomena ini, terjadi peningkatan kehidupan pariwisata di Benua Afrika terutama Afrika Selatan yang menghasilkan aktivitas ekonomi serta memberikan pengaruh ekonomi dalam praktik konservasi (Child et al., 2012). Namun hal ini menjadikan kerusakan lingkungan dimana terjadinya proses deteriorasi atau kemunduran lingkungan yang ditandai dengan hilang atau berkurangnya sumber daya tanah, air, udara, kepunahan serta kerusakan ekosistem.

Tabel 1. Pertumbuhan hewan dalam Pariwisata Perburuan

Sumber	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata per Tahun	Total	Persentase
Liar	3,536	3,422	3,068	2,811	1,426	2,853	14,263	68%
Tumbuh di Penangkaran	1,088	1,181	962	513	246	798	798	19%
Lahir di Penangkaran	407	574	654	757	318	542	542	13%

Sumber: *Human Society International South Africa Data*. (Humane Society International - Africa, 2021)

Dari data di atas, terjadi penurunan hewan baik secara liar maupun di penangkaran sejak tahun 2014-2018 (Humane Society International - Africa, 2021). Hal ini menjadikan pemanfaatan pariwisata perburuan hewan di Afrika Selatan berdampak pada ekosistem yang berjalan yang menimbulkan ancaman lingkungan hidup terhadap aktivitas sosial dan ekonomi manusia. Proses eksploitasi ini terjadi karena adanya kepentingan kelompok-kelompok kuat dalam masyarakat terhadap hubungan antara manusia dengan tanah, air, udara dan seluruh habitat sumber daya hutan dan alam (Jones, 2006).

Eksploitasi akan berhadapan dengan masuknya industri yang ekspansif, ekstraktif dan eksploitatif serta kapitalistik. Mereka dapat mengantur dan membuat peraturan serta perundang-undangan dengan cara membayar elit-elit politik untuk membuat undang-undang yang berpihak kepada mereka agar dapat memaksimalkan pemanfaatan sumber daya untuk kepentingannya (Burke & Stephens, 2018). Tahapan terjadinya proses eksploitasi tersebut ialah (1) Hilangnya ruang hidup bermasyarakat, Negara melakukan klaim terhadap suatu wilayah (lahan) yang apabila ada perlawanan maka akan melahirkan kriminalisasi (2) Proses kerusakan sumber daya alam yang sangat tinggi dan massif (3) Kerusakan ekologi, ketika rantai makanan rusak maka akan terjadi perubahan jaring-jaring makanan yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekosistem.

Manusia memandang dirinya sebagai pusat dari alam semesta dan hanya mereka yang mempunyai nilai, sementara alam dan segala isinya sekedar objek atau alat pemuas kepentingan dan kebutuhan manusia (Keraf, 2002). Cara pandang seperti ini melahirkan sikap dan perilaku eksploitatif tanpa kepedulian sama sekali terhadap alam dan segala isinya yang dianggap tidak mempunyai nilai sehingga manusia menjadi kurang sensitif terhadap ekologis yang berlangsung dalam alam tempatnya hidup.

Pariwisata perburuan hewan muncul terkait sumber daya alam yang disikapi sebagai masalah teknis dengan kebijakan yang diterapkan bersifat teknis. Ketika kebutuhan akan ekonomi terjadi di Negara dengan fauna paling terkenal di dunia seperti singa, badak, cheetah dan banyak lainnya, maka solusi yang hadir ialah penggunaan sumber daya tersebut terhadap kelangsungan hidup masyarakat dan Negara. Namun, selama masalah sumber daya dipahami sebagai masalah yang bersifat teknis, maka solusi yang diambil oleh para pengambil kebijakan pun bersifat teknis.

Afrika Selatan adalah contoh kasus yang menggambarkan bahwa persoalan penggunaan sumber daya sebagai komoditas tidak semata masalah teknis, ia bisa menjadi masalah sosial dan politik karena berkaitan dengan pemanfaatan dan kontrol atas sumber daya. Jurnal ini mencoba membahas perekonomian yang terjadi di Afrika Selatan melalui penggunaan perburuan hewan sebagai komoditas dan dampak ekologi yang telah dikaji melalui berbagai sumber dibawah ini.

Kerangka Teoritis

Teori ekologi politik ialah ilmu yang mempelajari aspek-aspek sosial politik terhadap lingkungannya dimana tujuannya bukan hanya menjelaskan fenomena perubahan lingkungan yang terjadi namun mereformulasikan kebijakan pengelolaan lingkungan.

Menurut Duffy dalam bukunya *killing for Conservation: Wildlife Policy in Zimbabwe* menyatakan secara umum, ekologi politik mengkaji politik perebutan penguasaan dan akses terhadap sumber daya alam (Duffy, 2001). Teori yang berfokus pada struktur, proses politik, ekonomi dan sosial ini mendukung praktik manusia yang mengarah pada permasalahan lingkungan. Ekologi politik menggambarkan pentingnya analisis sejarah dalam memahami perkembangan hubungan sosial dan pengaruhnya terhadap isu-isu lingkungan termasuk degradasi lingkungan dan penurunan populasi hewan liar (Neumann, 2009).

Ekologi politik memberikan tinjauan yang memperhatikan peran faktor sejarah, konstruksi sosial lingkungan dan hubungan kekuasaan dalam membentuk perubahan

lingkungan (Jones, 2006). Hal ini memberikan perhatian pada kekuatan sejarah, cara melihat lingkungan serta hubungan kekuasaan. Dimana satwa liar, keanekaragaman hayati dan lingkungan bukanlah sumber daya yang statis namun keberadaannya berhubungan dengan kebijakan dan politik dengan cara dukungan atas penggunaan lingkungan secara konsumtif.

Kebijakan penggunaan satwa liar adalah cerminan dari upaya individu dan kelompok untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau memanipulasi kondisi yang ada untuk menciptakan dan menggapai ambisi mereka (Ramutsindela, 2004). Kepentingan yang berbeda membentuk negosiasi, perlawanan dan menghadirkan tantangan akan tata kelola lingkungan yang terjadi disetiap fenomena. Ketidakberdayaan pemerintah dalam memusatkan perhatian pada konsekuensi kegiatan ekonomi mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap pemanfaatan lingkungan baik dalam hal eksploitasi sumber daya alam maupun degradasi alam.

Tantangan manusia saat ini ialah memenuhi kebutuhan semua orang dan memastikan tidak ada kekurangan kebutuhan hidup dengan ketergantungannya pada iklim yang stabil, tanah yang subur serta lapisan ozon sebagai pelindung (Raworth, 2015). Melalui penjelasannya, Raworth mengatakan ekonomi harus tumbuh dalam batasan donat dimana lingkaran dalam adalah pondasi sosial dan lingkaran luar adalah langit-langit ekologis. Pondasi sosial yang dimaksud ialah sebuah kondisi dimana semua orang mempunyai akses terhadap pendapatan, pekerjaan yang layak tanpa terkecuali. Sedangkan langit ekologis ialah batasan planet bumi, sehingga ketika kita merusak lingkungan maka batasan ini menjadi hilang dan berdampak pada lingkungan manusia.

Ekonomi lingkungan ialah ilmu yang mempelajari dampak keuangan dari kebijakan lingkungan yang digunakan untuk membantu pemerintah merancang kebijakan lingkungan yang tepat dan menganalisis efek serta manfaat dari kebijakan tersebut (Chen, 2021). Dalam teori ini, membahas keterlibatan kegiatan ekonomi dengan mempertimbangkan biaya produksi serta dampaknya.

Metode

Metode yang digunakan dalam jurnal ini ialah kualitatif. Metode kualitatif menurut Christopher Lamont dalam Umar Suryadi Bakry ialah metodologi yang digunakan untuk mendapatkan pemahaman dengan berbagai metode tentang bagaimana kita memahami dunia di sekitar kita dan mengharuskan fokus pada makna dan proses yang membentuk hubungan internasional (Bakry & Dimaswids, 2016).

Menggunakan studi literatur dimana sumber referensi penelitian berupa tulisan, baik buku, artikel, jurnal maupun sumber literatur lainnya digunakan untuk menganalisis objek penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Krisis Ekologi

a) Eksploitasi dalam Pariwisata Perburuan Hewan

Meningkatnya aktifitas pariwisata perburuan hewan berdampak terhadap lingkungan dimana hal ini menyertai kenaikan aktifitas yang mengancam keanekaragaman satwa hingga eksploitasi lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, penulis memandang pariwisata perburuan hewan dapat mengancam ekosistem yang ada saat ini, dimana fenomena meningkatnya ekonomi juga mengancam ekosistem dan kelangsungan hidup di masa mendatang. Menurut Hughes & Bennet, kaum ekoradikal berpikir bahwa ekosistem memiliki daya tampung yang terbatas, keterbatasan tersebut didefinisikan sebagai seberapa besar suatu populasi spesies dapat bertumbuh sebelum spesies tersebut berlebihan menggunakan sumber daya yang tersedia di ekosistem. (Hughes & Bennett, 1991)

Afrika Selatan dengan kekayaan hewan-hewan besar serta habitat alami yang luas menjadi inspirasi dalam pariwisata perburuan hewan di Dunia, lokasi perburuan hewan pun

tersebar diberbagai tempat seperti *The Ngorongoro Crater*, *Madikwe Private Game Reserve*, *The Kruger National Park*, *Sabi Sand Game Reserve* (Aschmann, 2022). Wisata yang menyajikan satwa liar beraksi di habitat langsung dimana semua objek berinteraksi satu sama lain yang dapat menyebabkan fenomena destruktif seperti perubahan iklim, wabah penyakit serta kelaparan. Sifat asli hewan sebagai pemburu alami, dimana mereka tidak dapat mengakses makanan yang siap pakai seperti yang dilakukan manusia diperlukan untuk menjaga keseimbangan piramida rantai makanan agar semua populasi tumbuhan dan hewan tetap seimbang adalah hal penting sebagai fungsi untuk memelihara kestabilan suatu ekosistem.

Eksplorasi dalam perburuan hewan adalah interaksi atas sikap manusia terhadap kehidupan liar yang tidak menjaga keseimbangan ekologi. Ekologi yang dimaksud ialah bagaimana beranekaragam tetumbuhan dan hewan memanfaatkan energi, saling membantu dan bekerjasama dengan menggunakan kondisi tanah dan curah hujan yang terjadi.

Sedangkan Ekosistem berarti suatu sistem yang terikat secara geografis yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang dicirikan dengan pertukaran materi dan proses berubahnya energi dan informasi (Soemarwoto, 1999). Bentuk-bentuk pertukaran yang dimaksud berdasarkan prinsip-prinsip ekologi seperti keseimbangan, daya tahan, persaingan, toleransi, adaptasi, evolusi, mutasi serta hukum entropi (Abdoellah, 2020).

Beberapa binatang perburuan hewan termasuk bagian dari spesies yang berisiko mengalami polusi genetik diantaranya Singa, Badak dan Cheetah. Rekayasa genetik dilakukan oleh berbagai aktor guna membiakkan hewan-hewan trofi tersebut hingga membuat genetika baru sebagai eksperimen yang bertujuan untuk keuntungan secara ekonomi dimana pemburu akan berusaha memburu binatang aneh dan baru (Nordling, 2020).

Terdapat peningkatan jumlah varian warna dari hasil pembiakan selektif dalam industri peternakan hewan di Afrika Selatan (Hetem et al., 2009). Pada tahun 2001 hanya 11 varian hewan yang dijual di lelang *Vleissentraal*, pada tahun 2014 meningkat hingga 1298 varian warna dimana terdapat lebih dari 40 variasi warna dari *African Bovidae*.

Warna kulit hewan memiliki fungsi komunikasi, penyembunyian dan fungsi fisiologis seperti termoregulasi (Stoner, 2003). Namun ketika varian warna menjadi tidak jelas akibat signifikansi adaptif maka terdapat dampak pada lingkungan yang terjadi seperti perilaku antipredator serta seleksi seksual hewan atas varian warna yang berbeda. Dengan dipaksakannya perubahan hewan dengan cara transgenik dapat juga menyebabkan polusi sebagai contoh hama yang menjadi tahan dan kebal terhadap pestisida (Andersson, 2020).

Afrika Selatan sebagai Negara pengakomodir Pariwisata Perburuan Hewan andil dalam mutasi genetik dengan mengubah Undang-Undang *Animal Improvement Act 62 Tahun 1998* dimana tujuan Undang-undang ini ialah menyediakan penghormatan, identifikasi dan pemanfaatan hewan yang unggul secara genetik untuk meningkatkan produksi dan kinerja hewan untuk kepentingan Republik (Afrika Selatan).

Dengan adanya Undang-undang tersebut, spesies yang bersangkutan akan memiliki potensi untuk digunakan sebagai hewan penjualan secara tinggi, dimana seharusnya undang-undang mengedepankan nilai ekonomi, sosial dan konservasi dari industri ini dan segala potensinya untuk mendukung ekonomi hijau di Afrika Selatan. Hal ini akibat adanya permintaan dari pemburu yang rela membayar lebih untuk mendapatkan spesies yang berbeda dan tidak biasa (Crowley, 2015).

Hal ini menjadikan integritas spesies hewan menjadi semakin kecil dan terisolasi dimana habitat serta biota perburuan tidak dilindungi dengan baik meskipun dalam kawasan lindung yang dikelola oleh Negara.

Dari 9 Provinsi di Afrika Selatan telah mengatur perburuan melalui peraturan yang bertujuan untuk mengatur pemanfaatan hasil buruan untuk kepentingan perlindungan sumber daya alam di masa depan. Tindakan ini dilakukan guna mengatasi ancaman terhadap

kepunahan satwa liar dengan cara melegalkan undang-undang dan strategi konservasi. Namun hal ini mengakibatkan pengabaian masyarakat lokal yang selama ini menjalankan praktik tradisional berdasarkan adat leluhur.

Sebagai contoh, pengaturan pemanfaatan satwa liar berdasarkan sistem perijinan dimana setiap pemburu diharuskan memiliki lisensi (ijin). Hal ini bertujuan untuk pemasukan Negara atas lisensi berburu dimana pada tahun 2010, para pemburu menghabiskan 1,5 miliar Rand untuk lisensi di wilayah Limpopo dan 665,5 juta untuk wilayah Free State (van der Merwe et al., 2014). Namun hal ini justru memberatkan masyarakat lokal dan bertentangan dengan tradisi masyarakat adat sehingga memilih untuk melakukan perburuan secara illegal untuk bertahan pada tradisi perburuan mereka.

Pengesahan undang-undang konservasi memperkuat ideologi proteksionis yang mengakibatkan sentralisasi terhadap pengelolaan satwa liar dan memperkuat diskriminasi terhadap masyarakat adat dan pengetahuan yang sudah berjalan ribuan tahun dengan cara mengurangi akses ke lahan maupun sumber daya satwa liar (Woodburn, 1997). Hal ini menciptakan dilemma bagi Afrika Selatan, dimana kebutuhan manusia terkadang bergantung pada akses alam. Sementara kebijakan konservasi dibenarkan atas dasar kebutuhan untuk mencapai keseimbangan ekologis melalui pengecualian dampak terhadap manusia.

b) Perampasan Lahan

Taman nasional dan kawasan lindung dibuat di era kolonial yang melibatkan pemindahan penduduk asli Afrika dari tanahnya (Nelson, 2000). Selain itu, kepemilikan atas tanah yang didominasi oleh petani kulit putih mengakibatkan pengusuran massal terhadap buruh tani serta menimbulkan biaya atas penyewaan lahan dimana hal ini menjadikan perkembangan pertanian satwa liar.

Situasi ini menghasilkan masyarakat lokal tidak hanya kehilangan tanah tetapi juga hak atas sumber daya di tanah yang mereka tinggalkan. Melalui undang-undang Dewan Distrik dan Pedesaan pada tahun 1988, petani lokal tidak memperoleh kepemilikan serta memberikan hak atas tanah dan sumber daya alam kepada dewan distrik dengan spesifikasi yang bervariasi. Dewan Distrik Pedesaan dapat bertindak untuk menyewakan tanah dan mengeksploitasi sumber daya alam atas nama kepemilikan umum (Murphree, 1988).

Pemerintah Afrika Selatan melalui Undang-undang lingkungan dan pertanian pada tahun 1994 mendelegasikan kepada pemilik lahan mempunyai hak untuk mengontrol penggunaan satwa liar di lahan mereka dengan tujuan membawa transformasi ekonomi dan sosial di Negara ini (Spierenburg, 2020). Namun pemilik lahan harus tunduk pada persyaratan atas ukuran dan pagar yang memadai sebelum pemerintah memberikan persetujuan penggunaan lahan tersebut (Jordan, 1996).

Hal ini menjadikan pemilik lahan di Afrika Selatan memperoleh kepemilikan penuh atas hewan liar yang berada di lahan mereka dan mengakibatkan 1/6 dari total tanah Afrika Selatan telah dipagar dan dirubah untuk penyediaan berbasis satwa liar (berburu, ekowisata) (Muir-Leresche & Nelson, 2000).

Pembentukan lahan milik pribadi untuk kepentingan pengelolaan satwa liar mengakibatkan populasi satwa liar di lahan pribadi meningkat pesat. Hal ini menggambarkan bahwa hewan-hewan semakin diperdagangkan secara pribadi dan di lelang untuk tujuan pariwisata satwa liar. Negara Afrika Selatan telah melegalkan dan memprivatisasi penggunaan satwa liar, mendorong perburuan, pariwisata dan penjualan daging, kulit serta tanduk.

Penggunaan lahan pribadi dalam sektor satwa liar dan pertanian yang terhubung ke tanah diharapkan memberikan manfaat secara adil, dimana tanah merupakan keberlanjutan atas pemenuhan beragam kebutuhan populasi yang ada di Afrika Selatan. Karena penggunaan lahan yang berbasis pemanfaatan dengan tujuan ekonomi akan mengakibatkan petani akan berupaya mengakses lanskap lain yang sebelumnya tidak dapat diakses.

Implikasi ekonomi

Afrika Selatan menggunakan perburuan hewan sebagai komoditas yang berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi. Pariwisata perburuan hewan menghabiskan ratusan hingga ribuan US dollar untuk membayar paket perburuan, akomodasi hingga peralatan perburuan dimana menjadikan fenomena ini sebagai perputaran ekonomi dari Negara maju ke Negara berkembang (Saayman et al., 2018).

Pemburu internasional akan menghabiskan biaya lebih besar dibandingkan turis satwa liar dimana biasanya mereka berkegiatan yang non konsumtif yaitu mengamati burung, melihat permainan dan liburan sedangkan pemburu internasional akan mengeluarkan uang untuk berburu berdasarkan hewan pilihannya. Selain itu, wisatawan perburuan umumnya memiliki sifat humanisme dimana mereka akan berusaha menjadi yang pertama atau pelopor dalam setiap hewan buruannya. Hal ini mendasari jasa pariwisata perburuan hewan semakin diakui dan memberikan manfaat kepada ekonomi lokal.

a) Sektor pariwisata

Wisatawan perburuan akan mengeluarkan uang dan menghasilkan pemasukan bagi perekonomian di Afrika Selatan. Untuk itu, berikut kategori pengeluaran yang dikeluarkan oleh wisatawan perburuan menurut Stynes dan White. (Stynes & White, 2006)

Tabel 2. Pengeluaran Wisatawan Perburuan Hewan di Afrika Selatan

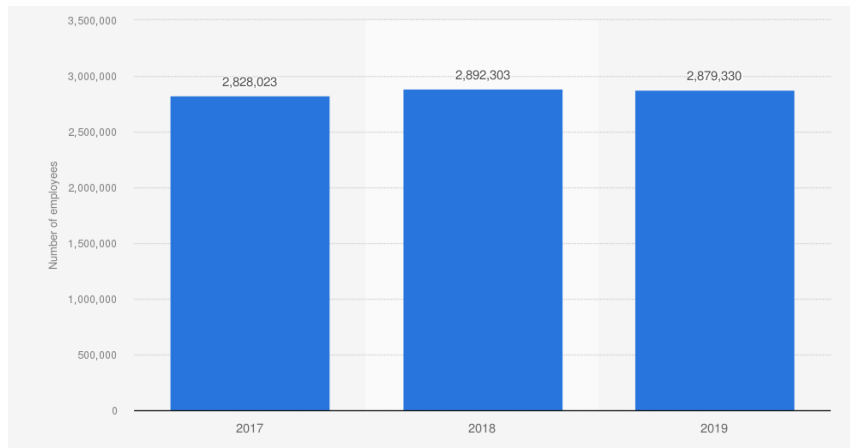
	Biaya yang dikeluarkan per pemburu (USD)	Persentase pengeluaran	Total pengeluaran (USD)
Permainan	13,278.58	47%	100,917,076
Transportasi ke Afrika Selatan	5,096.50	18%	38,733,412
Transportasi di Afrika Selatan	612.20	2%	4,652,711
Akomodasi dan Katering	3,721.76	13.2%	28,285,405
Pengeluaran diluar Paket	628.00	2.2%	4,772,823
Makanan	150.09	0.5%	1,146,856
Amunisi	68.16	0.2%	518,032
Pakaian	139.30	0.49%	1,058,678
Peralatan perburuan	230.58	0.8%	1,752,416
Biaya Pengiriman	2,848.79	10.1%	21,650,773
Surat Ijin	513.93	1.8%	3,905,865
Biaya Tambahan Peralatan	593.78	2.1%	4,512,727
Pengeluaran lainnya	387.39	1.3%	2,944,152
Total (USD)	28,269.86		214 850 926

Sumber: *The economic impact of trophy hunting in the south African wildlife industry* (Saayman et al., 2018)

Menurut data di atas, melalui kegiatan pariwisata perburuan meningkatkan permintaan barang, jasa terkait perburuan hewan yang akhirnya akan meningkatkan produksi dalam perekonomian di Afrika Selatan. Ketika produksi meningkat, maka akan memengaruhi industri lainnya yang menjadikan pariwisata perburuan hewan membawa efek langsung dan tidak langsung dalam pemasukan Negara.

Meningkatnya aktifitas pariwisata perburuan akan berdampak pada kenaikan pekerja pada sektor tersebut. Lapangan kerja pariwisata adalah pekerjaan yang terkait dengan barang dan jasa yang terhubung dengan pariwisata perburuan hewan.

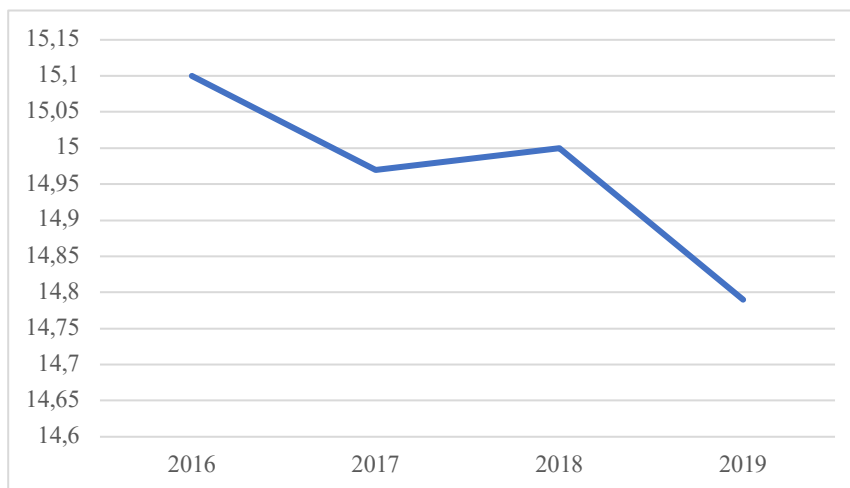
Grafik 1. Total pekerja industri pariwisata di Afrika Selatan dari 2017 - 2019



Sumber: *Tourism Satellite Account for South Africa, final 2017-2019* (Risenga Maluleke, 2021)

Tabel 2 menunjukkan lapangan kerja di industri pariwisata dari tahun 2017-2019. Menurut Maluleke, pada tahun 2017 industri pariwisata menyumbang 3,6% dari total pekerjaan, pada tahun 2018 3,7% serta 4,7% pada tahun 2019 (Risenga Maluleke, 2021). Dari data diatas, terdapat kenaikan atas pekerja pariwisata di Afrika Selatan, namun menurut data World Bank, sektor pariwisata di Afrika Selatan mengalami penurunan sejak 2016 – 2019.

Grafik 2. Jumlah kedatangan pariwisata internasional di Afrika Selatan



Sumber: *World Tourism Organization, Yearbook of Tourism Statistic*
<https://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.ARVL?locations=ZA&start=2016&end=2019&view=chart>

Menurut Safari Club Internasional mengatakan perburuan hewan merupakan sebuah sumber pendapatan. Namun berdasarkan data di atas menjadikan bias dimana sektor pekerja pariwisata bertambah meskipun jumlah kedatangan turis berkurang setiap tahunnya. Dalam laporan *Humane Society Internasional* perburuan trofi menghasilkan 0.78% dari keseluruhan pengeluaran pariwisata dan hanya memiliki dampak kecil pada lapangan pekerjaan (Humane Society International - Africa, 2021).

Kelompok Pemburu mencoba membenarkan aktivitas mereka dengan mengklaim bahwa pembunuhan hewan yang dilakukan membantu ekonomi lokal. Dalam laporan yang sama, pemburuan hampir tidak berkontribusi terhadap ekonomi maupun pekerjaan lokal

dibandingkan pariwisata secara keseluruhan dan sudah waktunya untuk berhenti membunuh hewan dan berpose foto yang tidak wajar mengatas namakan kontribusi bagi ekonomi lokal.

Pemburuan hewan adalah bagian kecil dari keseluruhan sektor pariwisata dengan sedikit ruang untuk pertumbuhan masa depan yang berkelanjutan dimana di masa depan akan membebani manfaat ekonominya sendiri.

b) Pertumbuhan PDB di Afrika Selatan

Melalui kegiatan pariwisata perburuan hewan menyebabkan peningkatan atas permintaan barang dan jasa sehingga setiap stimulus pengeluaran memiliki efek langsung, tidak langsung dan terinduksi pada produksi, pendapatan serta ketenagakerjaan dalam perekonomian. Melalui tabel di bawah ini, menggambarkan efek dari pengeluaran perburuan hewan pada ekonomi di Afrika Selatan melalui produksi barang dan jasa.

Tabel 3. Produksi barang dan jasa di Afrika Selatan

Sektor	Total Produksi	Pemasukan Terendah	Pemasukan Tengah	Total Pemasukan	Presentase
Pertanian	1961.654	164.804	675.322	1677.760	34.3%
Pertambangan	125.138	9.412	48.763	120.950	2.5%
Manufaktur	840.208	63.508	293.786	708.169	14.5%
Listrik dan air	89.911	5.716	33.534	85.888	1.8%
Konstruksi	61.472	5.152	22.407	54.030	1.1%
Perdagangan akomoasi dan catering	478.184	38.131	183.826	446.598	9.1%
Transportasi dan komunikasi	816.314	58.925	290.397	721.391	14.7%
Layanan keuangan dan bisnis	501.370	37.152	221.191	539.330	11.0%
Pemerintah	245.255	19.963	112.636	270.746	5.5%
Layanan pribadi dan sosial	270.011	35.370	110.973	270.043	5.5%
Total	5389.516	438.133	1992.835	4894.905	100%

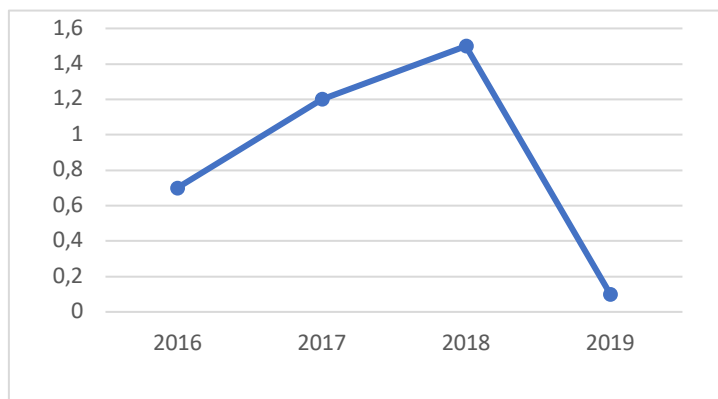
Sumber: *The economic impact of trophy hunting in the south African wildlife industry* (Saayman et al., 2018)

Berdasarkan data Tabel 3, sektor pertanian di Afrika Selatan merupakan produk teratas dalam pertumbuhan ekonomi dimana sektor tersebut memiliki keberagaman dalam pengolahannya. Sektor pertanian di Afrika Selatan bukan hanya diperuntukan untuk perburuan Hewan, menurut laporan dari Wellington Sikuka dalam laporan lembar fakta produksi pertanian Afrika Selatan produksi dalam sektor pertanian ialah semua produksi yang mencakup biji-bijian utama (kecuali beras), biji minyak, buah-buahan, gula, jeruk anggur, sayuran, hewan-hewan sebagai konsumsi seperti sapi (serta susu), babi, domba, ayam pedaging, burung unta dan telur (Sikuka, 2019).

Lalu, berdasarkan Tabel 3, manufaktur menempati posisi ketiga sebagai bagian dari produksi barang dan jasa di Afrika Selatan. Industri manufaktur di Afrika selatan diantaranya ialah minyak bumi, produk kimia, karet dan produk plastik, serta besi dan baja dasar, produk logam dan mesin. Afrika Selatan adalah pengeksport Platinum terbesar di dunia (USD 11,9 miliar), Bijih Mangan (USD 2,59 miliar), Bijih Kromium (USD 1,56 miliar), Produk Logam Mulia (USD 1,32 miliar) dan Bijih Titanium (USD 569 juta) (The Observatory of Economic Complexity, 2020).

Hal ini menunjukkan bagaimana ekonomi di Afrika Selatan sangat bergantung terhadap sektor pertanian dan diikuti oleh manufaktur sebagaimana yang telah dijelaskan bukan bergantung terhadap wisata perburuan hewan. Meskipun pariwisata perburuan hewan memengaruhi sektor transportasi dan berkontribusi sebesar 14,7% serta sektor perdagangan, akomodasi dan katering 9,1%. Dalam menganalisis dampak ekonomi yang dihasilkan melalui perburuan hewan selain menggunakan data Produksi barang dan jasa, dapat juga menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut *Global Edge*, kontribusi utama dalam ekonomi di Afrika Selatan ialah ekspor batu, logam mulia, biji serta kendaraan bermotor serta suku cadangnya dimana hal ini membuat Afrika Selatan menjadi Negara berpendapatan menengah keatas (The World Bank, 2020).

Grafik 3. Pertumbuhan PDB Tahunan Afrika Selatan



Sumber: *World Bank National Account Data, Yearbook of Tourism Statistic*
<https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2019&locations=ZA&start=2016>

Dalam grafik di atas memberikan gambaran kinerja ekonomi Negara Afrika Selatan pada tahun 2016-2019 dimana Afrika Selatan mengalami pertumbuhan yang stabil dan tetap dianggap memiliki pertumbuhan secara keseluruhan meskipun terdapat penurunan pada tahun 2016 dan 2019. Jika Pariwisata berkontribusi dalam ekonomi Afrika Selatan, hal ini tidak sejalan dengan data kedatangan turis pada Grafik 2, dimana turis bergerak stabil dengan sedikit penurunan. Hal ini juga membuktikan bahwa pariwisata bukan satu sektor yang memegang kendali dalam pendapatan Negara Afrika Selatan.

Dari data-data di atas menyatakan keterbatasan dalam signifikansi ekonomi serta manfaat dari konservasi dengan melangsungkan fenomena perburuan hewan di Afrika Selatan. Manfaat ekonomi yang tertera dalam Tabel 2 sangat kecil dengan penggunaan konservasi hingga berakibat rusaknya sistem dan tujuan utama konservasi, terlebih penggunaan spesies ikonik sebagai hewan perburuan akan menghasilkan kehancuran ekologis karena menargetkan spesies tertentu agar menjadikan hewan perburuan sebagai piala terbaik. Melalui data-data diatas, sudah seharusnya fenomena perburuan hewan di Afrika Selatan tidak dapat dijadikan alasan sebagai penopang di Negara ini.

Kesimpulan

Perburuan yang berlebihan akan menyebabkan menurunnya spesies hewan, hal ini tentu akan memengaruhi segala sesuatu di sekitarnya, sebagai contoh, tumbuhan dan pepohonan dimana hal ini memengaruhi lingkungan alam karena membuang predasi alami dan pertumbuhan populasi satwa. Pada fokus perburuan hewan, hal ini mengakibatkan efek berkepanjangan terhadap biota hutan lainnya yang akan berdampak juga pada rantai makanan

dimana hewan pemangsa akan terpaksa meninggalkan habitat aslinya karena tidak menemukan pasokan makanan yang cukup dan lebih buruk lagi pada saat mereka berusaha menemukan habitat baru ekosistem yang berjalan juga tidak lebih baik karena semakin luasnya area perburuan hewan.

Pariwisata Perburuan Hewan di Afrika Selatan telah memperlihatkan hubungan antara lingkungan dan kekuasaan. Satwa liar, keanekaragaman hayati dan lingkungan bukanlah sumber daya yang stagnan, keberlangsungannya berubah-ubah berdasarkan hubungan antara manusia serta kebijakan suatu Negara. Bagaimana suatu Negara hadir mendukung penggunaan lingkungan yang secara konsumtif dan menciptakan ekologi untuk dimasa mendatang. Pembangunan ekonomi suatu Negara diharapkan berkelanjutan yang tidak hanya secara ekonomi namun secara ekologis dimana pemerintah hadir untuk mengantisipasi dampak yang timbul terhadap lingkungan.

Daftar Pustaka

- Abdoellah, P. O. (2020). *Dari Ekologi Manusia Ke Ekologi Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Amirullah. (2015). *Krisis Ekologi: Problematika Sains Modern*. Lentera.
- Andersson, L. (2020). Mutations in Domestic Animals Disrupting or Creating Pigmentation Patterns . *Evolutionary Developmental Biology* .
- Aschmann, A. (2022). *When And Where To See The Big 5 In Africa*. Retrieved from go2africa: <https://www.go2africa.com/african-travel-blog/best-time-of-year-to-see-the-big-5-in-africa>
- Bank, T. W. (2020). *South Africa: Economy*. Retrieved from Global Business Knowledge: <https://globaledege.msu.edu/countries/south-africa/economy>
- Bauer, J., & Alexander, H. (2004). *Wildlife tourism: Impacts, management and planning*. Altona.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Child, B. A., Musengezi, J., Parent, G. D., & Child, G. F. (2012). The economics and institutional economics of wildlife on private land in Africa. *Pastoralism: Research, Policy and Practice*.
- Committee, T. B. (1996, December 13). *Conservation and sustainable use of South Africa's biological diversity Green Paper*. Retrieved from South African Government: <https://www.gov.za/documents/conservation-and-sustainable-use-south-africas-biological-diversity-green-paper>
- Complexity, T. O. (2020). *South Africa*. Retrieved from OEC World: <https://oec.world/en/profile/country/zaf?compareSelector=compare6&subnationalTimeSelector=timeYear>
- Davis, B. (2009, November 10). *Does Hunting Help or Hurt the Environment?* Retrieved from Scientific American: <https://www.scientificamerican.com/article/earth-talks-hunting/>
- Gibson, C. C. (1999). Politicians and Poachers: The Political Economy of Wildlife Policy in Africa. *American Political Science Association* .
- Hughes, D. G., & Bennett, P. M. (1991). Captive breeding and the conservation of invertebrates. *The Zoological Society of London*.
- HSI. (2021, May). *Trophy Hunting by the Numbers*. Retrieved from Human Society International: <https://www.hsi.org/wp-content/uploads/2022/02/HSI-Africa-Trophy-Hunting-Report-05-2021.pdf>
- Jr, L. W. (1967). The Historical Roots of Our Ecological Crisis. *Science*.

- Murombedzi, J. C. (2003). Pre-colonial and colonial conservation practices in southern Africa and their legacy today. *UN Economic Commission for Africa* .
- Nordling, L. (2020, Jan 29). *South Africa's move to allow farming of lions and other wildlife is a bad idea, scientists say*. Retrieved from Science: <https://www.science.org/content/article/south-africa-s-move-allow-farming-lions-and-other-wildlife-bad-idea-scientists-say>
- Semcer, C. E. (2019, July 18). *The Role of Hunting in Conserving African Wildlife*. Retrieved from PERC: <https://www.perc.org/2019/07/18/the-role-of-hunting-in-conserving-african-wildlife/>
- Sheikh, P. A. (2019). *International Trophy Hunting*. Congressional Research Service.
- Sikuka, W. (2019). *Fact Sheet of South African Agricultural Production*. Pretoria: Global Agricultural Information Network.
- Soemarwoto, O. (1999). *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Stynes, D. J., & White, E. M. (2006). Reflections on Measuring Recreation and Travel Spending. *Indexing & Metrics*.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Woodburn, J. (1997). Indigenous discrimination: The ideological basis for local discrimination against hunter-gatherer minorities in sub-Saharan Africa. *Ethnic and Racial Studies*.